

ASLI

JUR. EK. PEMBANGUNAN

16-06-2023

FAKULTAS EKONOMI UNSRI

**KAUSALITAS KORUPSI TERHADAP KEMISKINAN DAN KUALITAS
LINGKUNGAN HIDUP PADA 5 PROVINSI DENGAN
TINGKAT KORUPSI TERTINGGI DI INDONESIA**



Skripsi Oleh :

Nadia Putri Salsabila

01021181924005

EKONOMI PEMBANGUNAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2023

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDRALAYA**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**KAUSALITAS KORUPSI TERHADAP KEMISKINAN DAN KUALITAS
LINGKUNGAN PADA 5 PROVINSI DENGAN TINGKAT KORUPSI
TERTINGGI DI INDONESIA**


Disusun Oleh

Nama : Nadia Putri Salsabila
NIM : 01021181924005
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Regional

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal: 15-5-2023


Ketua: Imelda, S.E., M.S.E
NIP. 197703092009122002

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**KAUSALITAS KORUPSI TERHADAP KEMISKINAN DAN KUALITAS
LINGKUNGAN HIDUP PADA 5 PROVINSI DENGAN TINGKAT
KORUPSI TERTINGGI DI INDONESIA**

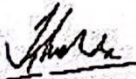
Disusun Oleh

Nama : Nadia Putri Salsabila
NIM : 01021181924005
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian Konsentrasi : Ekonomi Regional

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 8 Juni 2023 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

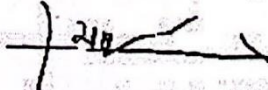
Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 13 Juni 2023

Ketua


Imelda, S.E., M.S.E

NIP. 19770309200912202

Anggota


Mardalena, S.E., M.Si

NIP : 197804212014092004

Mengesahui,
Ketua Jurusan

ASLI

JUR. EK. PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

16-06-2023



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama Mahasiswa : Nadia Putri Salsabila
NIM : 01021181924005
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian : Ekonomi Regional
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan yang sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

Pengaruh Perubahan Iklim, Bencana Alam dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi di Indonesia.

Pembimbing : Imelda, S.E., M.S.E.

Tanggal Ujian : 8 Juni 2023

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan selain
hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan
saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut dari predikat kelulusan
dan gelar kesarjanaan.

Indralaya, 16 Juni 2023

ASLI
JUR. EK. PEMBANGUNAN 16-06-2023
FAKULTAS EKONOMI UNSRI



Nadia Putri Salsabila
01021181924005

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kausalitas Korupsi terhadap Kemiskinan dan Kualitas Lingkungan Hidup pada 5 Provinsi dengan Tingkat Korupsi Tertinggi di Indonesia” Skripsi ini menjadi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Ekonomi dalam program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Pada penulisan skripsi ini disusun berdasarkan referensi pada penelitian sebelumnya serta adanya penambahan referensi penelitian terbaru. Skripsi ini menganalisis tentang kausalitas antara korupsi terhadap kemiskinan dan kualitas lingkungan hidup. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis tak lepas dari kendala yang terjadi, sehingga harus melakukan bimbingan agar skripsi ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat terbuka akan adanya kritik demi membangun kepentingan bersama.

Indralaya, 15 Mei 2023



Nadia Putri Salsabila

NIM. 01021181924005

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puja puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas karunia dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selama penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis yaitu almarhumah mama Kartika Sari Dewy, terimakasih untuk waktu singkat yang telah engkau berikan dengan selalu mendoakan, menyayangi, mendidik, memberikan pembelajaran tentang hidup yang berharga ini serta dukungan yang tak henti-henti dilakukan beliau semasa hidupnya agar saya semangat dalam menyelesaikan perkuliahan ini dan memberikan selalu memberikan saya pemahaman akan pentingnya Pendidikan, papa Andy Aprianto terimakasih untuk supportnya. Tidak ada kata-kata yang dapat mendeskripsikan betapa saya bersyukur dan terimakasih karena telah memiliki kalian. Semoga pengorbanan dan kerja keras yang kalian lakukan terhadap penulis akan dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Gelar Sarjana Ekonomi ini sata persembahkan untuk kalian.

2. Bapak Dr. Mukhlis, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, terima kasih atas segala dukungan dan bantuan yang bapak berikan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan sarjana di Jurusan Ekonomi Pembangunan ini
3. Ibu Imelda, S.E., M.S.E , selaku Dosen Pembimbing Skripsi terimakasih banyak bu telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan arahan kepada penulis agar skripsi yang penulis tulis lebih baik, hal tersebut sangat membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dan mampu menyelesaikan Pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, semoga kebaikan dan bantuan ibu selama ini dibalas oleh Allah SWT.
4. Ibu Mardalena, S.E., M.Si selaku Dosen Penguji penulis, terima kasih banyak atas segala kritik, saran dan arahan yang telah ibu berikan sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, terima kasih banyak atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Kepada keluarga penulis, adik-adikku Nazwa Zahra dan Kayla Nafisa terimakasih banyak karena selalu membantu dan memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi .

7. Kepada keluarga besar Ali Gatmir terimakasih karena telah memberikan support dan selalu mendoakan, sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
8. Kepada tante Rika Trisna dan om Temi terimakasih untuk kerja kerasnya karena telah selalu membantu dalam pembiayaan kuliah penulis.
9. Kepada keluarga besar Muslimin dan sahabat saya Nouval Alfikar , terimakasih atas bantuan , support dan donator dalam pengerjaan skripsi ini, hingga saat ini dapat menyelesaikan gelar Sarjana Ekonomi.
10. Kepada teman-teman saya Gustina, Devi, Lili, Sekar, Hani, Nadira, Inggit, Faza, Ica dan Wanda terimakasih atas bantuan dan memberikan semangat kepada penulis.
11. Dan untuk semua pihak yang terlibat dalam kelancaran dan pemberkasan dari penulisan skripsi ini yang mungkin tidak saya sebutkan satu per satu, saya ucapkan terimakasih atas segala bentuk
12. kebaikan yang telah kalian berikan, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT, aamiin yarabbalamin.

Indralaya, 15 Mei 2023



Nadia Putri Salsabila

NIM. 01021181924005

ABSTRAK

KAUSALITAS KORUPSI TERHADAP KEMISKINAN DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP PADA 5 PROVINSI DENGAN TINGKAT KORUPSI TERTINGGI DI INDONESIA

Oleh :

Nadia Putri Salsabila; Mardalena; Imelda

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kausalitas korupsi terhadap kemiskinan dan kualitas lingkungan hidup pada 5 provinsi dengan tingkat korupsi tertinggi di Indonesia. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data panel yang terdiri dari 5 provinsi dengan tingkat korupsi tertinggi di Indonesia yaitu, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan selama periode 2011-2021. Teknik analisis yang digunakan adalah Uji Kausalitas Granger. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi dan kemiskinan memiliki kausalitas dua arah, lalu korupsi terhadap kualitas lingkungan hidup tidak memiliki kausalitas dan kemiskinan terhadap kualitas lingkungan hidup juga tidak memiliki kausalitas.

Kata Kunci : *Kausalitas, Korupsi, Kemiskinan, Kualitas Lingkungan Hidup, Degradasi Lingkungan.*

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Ketua,



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si.

NIP: 197304062010121001



Imelda, S.E., M.S.E.

NIP : 197703092009122002

ABSTRACT

CAUSALITY OF CORRUPTION ON POVERTY AND ENVIRONMENTAL QUALITY IN FIVE PROVINCE WITH THE HIGHEST LEVEL OF CORRUPTION IN INDONESIAN

By :

Nadia Putri Salsabila; Mardalena; Imelda

This study aims to analyze the causality of corruption on poverty and environmental quality in 5 provinces with the highest levels of corruption in Indonesia. The data used in this study is panel data consisting from 5 provinces with the highest levels of corruption in Indonesia, namely, North Sumatra, West Java, Central Java, East Java and South Sulawesi during the 2011-2021 period. The analysis technique used is the Granger Causality Test. The results of this study indicate that corruption and poverty have a two-way causality, then corruption has no causality on environmental quality and poverty has no causality on environmental quality.

Keywords: *Causality, Corruption, Poverty, Environmental Quality, Environmental Degradation.*

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Ketua,



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si.
NIP: 197304062010121001



Imelda, S.E., M.S.E.
NIP : 197703092009122002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Mahasiwa : Nadia Putri Salsabila
NIM : 01021181924005
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 16 Oktober 2001
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Jalan Mayor Zen No. 20 RT. 25 RW. 07
Kelurahan Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni
Email : nadiapsalsabila16@gmail.com
No. Handphone : 0831-5554-8062



PENDIDIKAN FORMAL

2006-2012 : SD Negeri 204 Palembang
2012-2015 : SMP Negeri 8 Palembang
2015-2018 : SMA Negeri 5 Palembang

PENGALAMAN ORGANISASI

- Anggota Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (IMEPA) Universitas Sriwijaya

DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN KOMPREHENSIF.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKIRPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	14
1.2.2 Manfaat Praktik	14
BAB II STUDI PUSTAKA	15
2.1 Landasan Teori	15
2.1.1 Teori Neoklasik Ekonomi Politik Pembangunan	15
2.1.2 Teori Kutukan Sumber Daya Alam (Dutch Diases).....	19
2.2 Konsep dan Definisi	24
2.2.1 Korupsi	24
2.2.1.1 Keterkaitan Korupsi terhadap Kemiskinan.....	25
2.2.1.2 Keterkaitan Korupsi terhadap Kualitas Lingkungan Hidup.....	26
2.2.2 Kemiskinan.....	26
2.2.2.1 Keterkaitan Kemiskinan terhadap Kualitas Lingkungan Hidup.....	27
2.2.3 Kualitas Lingkungan Hidup.....	28

2.3	Penelitian Terdahulu.....	29
2.4	Kerangka Pikir.....	31
2.5	Hipotesis.....	34
BAB III METODE PENELITIAN		35
3.1	Ruang Lingkup Penelitian.....	35
3.2	Jenis dan Sumber Data.....	35
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.4	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	36
3.5	Teknik Analisis.....	36
3.5.1.	Uji Stasioner Data.....	37
3.5.2	Uji Penentuan Lag.....	37
3.5.3	Kausalitas <i>Granger</i>	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		41
4.1	Hasil Penelitian.....	41
4.1.1	Perkembangan Korupsi di Indonesia.....	41
4.1.2	Perkembangan Korupsi di 5 Provinsi dengan Tingkat Korupsi Tertinggi.....	44
4.1.3	Perkembangan Kemiskinan di 5 Provinsi dengan Tingkat Korupsi Tertinggi.....	47
4.1.4	Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	50
4.1.5	Hasil Estimasi.....	52
4.1.6	Hasil Estimasi Uji Stasioner.....	52
4.1.7	Hasil Estimasi Penentuan Lag Optimal.....	53
4.1.8	Hasil Uji Kausalitas <i>Granger</i>	54
4.2	PEMBAHASAN.....	55
4.2.1	Hubungan antara Korupsi terhadap Kemiskinan.....	55
4.2.2	Hubungan antara Korupsi dan Kualitas Lingkungan Hidup.....	58
4.2.3	Hubungan antara Kemiskinan dan Kualitas Lingkungan Hidup.....	59
BAB V PENUTUP		63
5.1	KESIMPULAN.....	63
5.2	SARAN.....	64
DAFTAR PUSTAKA		66
LAMPIRAN.....		73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perbandingan Tingkat Kemiskinan dan Kasus Korupsi di Indonesia Tahun 2011-2021.	3
Gambar 1.2 Tren Kasus Korupsi di 5 Provinsi tertinggi di Indonesia Tahun 2021.....	5
Gambar 1.3 Perbandingan Tingkat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Tingkat Kasus Korupsi di Indonesia tahun 2011 – 2021.....	7
Gambar 2.1 Kerangka Pikir	33
Gambar 4.1 Perkembangan Korupsi di Indonesia tahun 2011-2021.	42
Gambar 4.2 Perkembangan Korupsi Berdasarkan 5 Provinsi dengan Tingkat Korupsi Tertinggi Tahun 2011-2021.....	44
Gambar 4.5 Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Hasil Uji Unit Root.....	52
Tabel 4.2 Hasil Uji Lag Optimal Variabel Korupsi, Kemiskinan dan Kualitas Lingkungan Hidup.....	53
Tabel 4.3 Hasil Uji Kausalitas Granger.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Uji Unit Root (Level) variabel Korupsi (COR).....	73
Lampiran 2 Uji Unit Root (1 st Difference) variabel Korupsi (COR)....	74
Lampiran 3 Uji Unit Root (2 nd Difference) variabel Korupsi (COR)...	75
Lampiran 4 Uji Unit Root (Level) variabel Kemiskinan (POV)	76
Lampiran 5 Uji Unit Root (1 st Difference) variabel Kemiskinan (POV)	77
Lampiran 6 Uji Unit Root (2 nd Difference) variabel Kemiskinan (POV)	78
Lampiran 7 Uji Unit Root (Level) variabel Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	79
Lampiran 8 Uji Unit Root (1 st Difference) variabel Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	80
Lampiran 9 Uji Unit Root (2 st Difference) variabel Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	81
Lampiran 10 Uji Lag Optimal.....	82
Lampiran 11 Uji Kausalitas Granger	82
Lampiran 12 Data Variabel Korupsi, Kemiskinan dan Kualitas Lingkungan Hidup di 5 Provinsi dengan Tingkat Kasus Korupsi tertinggi di Indonesia Tahun 2011-2021	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbicara tentang tindak pidana korupsi tentunya sudah menjadi hal yang tidak asing dalam retorika kehidupan berbangsa serta hal klasik yang sudah sering terjadi (Engkus *et al.*,2022). Seperti di negara Indonesia, korupsi menjadi penyebab terpuruknya kondisi perekonomian negara ini karena hal tersebut terjadi secara sistemik serta meluas dan korupsi memiliki efek penghancur yang hebat (*an enermous effect*) (Rinaldo, 2020).

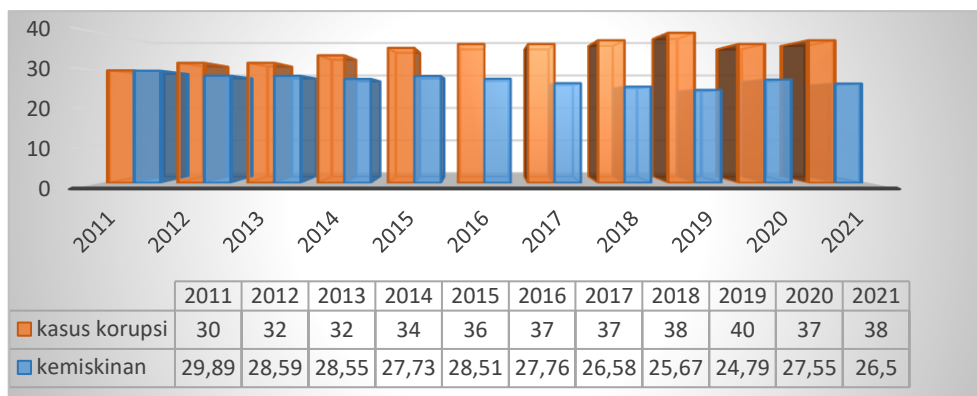
Jika praktik korupsi sudah merajalela, maka mengindikasikan munculnya berbagai permasalahan ekonomi seperti lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi maka akan berpengaruh terhadap penurunan produktifitas, penurunan produktifitas secara terus-menerus menimbulkan peningkatan pengangguran yang akan berujung pada kenaikan tingkat kemiskinan (Jannah dan Susiowati, 2019). Hal ini terjadi dikarenakan praktik korupsi yang tinggi mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi atau ketidakefisienan dalam keseimbangan perekonomian (Yolanda dan Satrianto, 2019). Pada sektor privat (swasta), korupsi menaikkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal dalam negosiasi dengan pejabat korup sehingga meningkatkan resiko pembatalan perjanjian (Junaidi dan Patra, 2017).

Korupsi juga terjadi pada layanan publik seperti penurunan kondisi kualitas

jalan raya yang diakibatkan karena tidak terpenuhinya syarat - syarat keamanan bangunan, material, produksi, kesehatan dan lingkungan hidup sehingga terjadilah kondisi kualitas aspal yang cepat rusak. Lalu pada infrastruktur misalnya, pondasi bangunan jembatan yang ringkih dan tidak memenuhi standar operasional pembangunan dapat menimbulkan efek buruk dalam waktu jangka pendek dan menyebabkan menurunnya kualitas beras murah yang tidak layak untuk disalurkan kepada masyarakat, serta korupsi juga menyebabkan penurunan pada pembangunan operasional sekolah dimana kondisi insfrastruktur sekolah tidak memadai sehingga tidak dapat melaksanakan pembelajaran dengan nyaman dan efektif (Bura, 2011).

Tidak hanya itu korupsi juga menyebabkan menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak dan menimbulkan meningkatnya hutang negara. Kondisi ini meningkatkan resesi bagi negara Indonesia jika korupsi terus menerus terjadi maka hutang luar negeri semakin besar. Penyebab-penyebab korupsi tersebut akan berujung pada ketidaksejahteraan masyarakat dan menimbulkan meningkatnya tingkat kemiskinan masyarakat (Rinaldo, 2020). Oleh karena itu korupsi digolongkan pada *extra-ordinary crime* (kejahatan luar biasa) sehingga sangat perlu untuk diberantas (Haifa dan Ilham, 2022). Pemberantasan korupsi sendiri menjadi kewajiban penting yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan untuk memberantas korupsi.

Apabila pemerintah dapat mengurangi angka korupsi maka hal tersebut dapat menekankan angka kemiskinan, begitupun sebaliknya apabila tingkat korupsinya tinggi maka akan berdampak melonjaknya tingkat kemiskinan (Waluyo, 2010).



Gambar 1.1 Perbandingan Tingkat Kemiskinan dan Kasus Korupsi di Indonesia Tahun 2011-2021.

Sumber: Indonesia Corruption Watch dan BPS

Pada Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa tingkat kemiskinan dan kasus korupsi terjadi cenderung fluktuatif dimana pada saat tingkat korupsi mengalami perubahan maka tingkat kemiskinan juga akan mengalami perubahan. Kemiskinan tertinggi pada tahun 2011 sebesar 29,89 dan terendah pada tahun 2018 yaitu sebesar 25,67. Sedangkan korupsi tertinggi terjadi pada tahun 2019 mencapai 40 point dan terendahnya pada tahun 2011 yaitu 30 point. Kasus korupsi di Indonesia mengalami kenaikan, meski mengalami penurunan di tahun tertentu. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Indonesia Corruption Watch (2021) bahwa kasus korupsi tercatat meningkat 1 point menjadi 38 dari skala 0 -100 pada tahun 2021. Kenaikan nilai ini berpengaruh pada peringkat kasus korupsi negara Indonesia yang sebelumnya berada pada tingkat 102 kini berada di urutan ke 98 dari 180 negara lain korupsi sempat menyentuh angka sebesar 40 poin pada tahun 2019, kemudian nilai tersebut turun menjadi 3 poin pada tahun 2020. Diketahui bahwa kenaikan sebesar satu terpidana kasus korupsi akan berpengaruh pada meningkatnya tingkat kemiskinan, misalnya jika jumlah kasus korupsi tiap tahunnya meningkat sebesar

100 kasus maka kemiskinan di Indonesia akan meningkat sebesar 1,01% (Samudra dan Munandar, 2019).

Oleh karena itu, pemerintah telah berupaya untuk memberantas korupsi dengan mengeluarkan kebijakan – kebijakan yang bertujuan menghilangkan korupsi serta menekankan angka tingkat kemiskinan yang diakibatkan oleh korupsi, namun ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan hal tersebut disertai dengan maraknya praktik korupsi (Samputra dan Munandar, 2020). Bukannya memberikan dampak positif terhadap perekonomian justru hanya menimbulkan permasalahan baru bagi perekonomian yang semakin membuat memburuknya perekonomian (Nwankwo, 2013).

Seperti program dari pemerintah yaitu, Bantuan Langsung Tunai atau BLT Desa merupakan pemberian langsung tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa dan bertujuan untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi COVID – 19 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020). Banyak kasus – kasus korupsi yang diakibatkan oleh pemanfaatan kondisi dari kebijakan pengentasan kemiskinan seperti korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Tenjomajaya, Jawa Barat oleh karena kasus tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp. 325.000.000 (Wamad, 2021).

Kasus selanjutnya yaitu korupsi dana bantuan sosial (Bansos) yang dipublikasi oleh kementerian sosial, pada kasus ini merupakan korupsi dana program keluarga harapan (PKH) yang dilakukan disalah satu kabupaten malang tindakan ini merupakan perbuatan yang disebabkan oleh salah satu oknum dengan modus tidak memberikan kartu keluarga sejahtera (KKS) pada sekitar

37 keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Malang, seluruh dana bansos yang dikuasai tersangka sebagian besar dibelanjakan untuk kepentingan pribadi total kerugian negara ditaksir mencapai Rp. 450.000.000 (Setiawan, 2021).

Demikian pula dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang merupakan program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi pelaksanaan program wajib belajar, bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu (Kementerian Keuangan, 2022). Kasus korupsi pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan oleh mantan Kepala Sekolah SD Negeri 79 Palembang, berdasarkan Nomor 01/L.6.10/Fd.1/Pidsus/12/2020 negara mengalami kerugian sebesar Rp.457.553.000,- (Prasetyo, 2021).

Kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berujung pada pemanfaatan kondisi untuk memperkaya diri, seharusnya bantuan-bantuan tersebut membantu untuk mengentaskan kemiskinan tetapi malah sebaliknya justru meningkatkan permasalahan kemiskinan (Connery, Lowing dan Sendow, 2022).



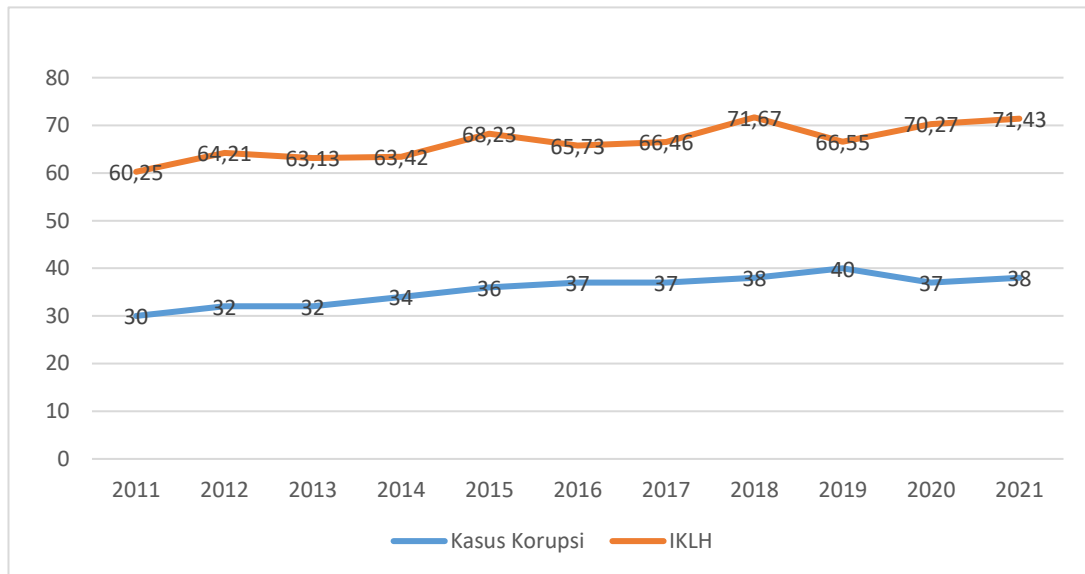
Gambar 1.2 Tren Kasus Korupsi di 5 Provinsi tertinggi di Indonesia Tahun 2021.

Sumber : *Indonesia Corruption Watch*

Dilihat dari Gambar 1.1 pada tahun 2021, menunjukkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat tren kasus korupsi yang signifikan meningkat, kenaikan tingkat nilai kerugian keuangan negara tersebut setidaknya mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan pemerintah setiap tahunnya masih perlu ditingkatkan dari segi pengawasan dalam rangka mencegah penyelewengan terhadap anggaran negara. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa akibat dari korupsi sendiri akan sangat berdampak menghambat upaya negara dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia dan menimbulkan dampak-dampak ekonomi yang diakibatkan oleh korupsi. Diketahui bahwa dari gambar tersebut menunjukkan bahwa tingkat korupsi tertinggi di Indonesia memiliki data yang konsisten selama 10 tahun terakhir yaitu Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan (ICW, 2016 dan 2021).

Korupsi tidak hanya menyebabkan kemiskinan tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan. Kasus korupsi merupakan salah satu penyebab utama degradasi lingkungan di suatu negara, terutama pada negara berkembang (Cui *et al.*, 2021). Hal ini dapat disebabkan lemahnya institusi pemerintah di negara berkembang ketika institusi lemah, beberapa diantaranya rentan terjadi praktik korupsi misalnya undang - undang lingkungan diabaikan sehingga membuat masyarakat kurang tanggap dan mengabaikan kerusakan lingkungan hidup. Terutama di beberapa negara berkembang yang dikaruniai sumber daya alam yang relatif melimpah, sumber daya alam tersebut memfasilitasi munculnya jaringan korupsi yang menggunakan pendapatan dari penghasilan sumber daya alam milik negara - negara tersebut (Sinha *et al.*, 2019). Korupsi mempengaruhi disfungsi sistem tata kelola lingkungan yang berkontribusi

terhadap kepunahan spesies, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, pencemaran serta degradasi ekosistem melalui cara penggelapan dan penyuaipan, korupsi dapat juga mengalihkan dana yang dialokasikan untuk program lingkungan ke kantong pribadi (Lisciandra dan Migliardo, 2016).



Gambar 1.3 Perbandingan Tingkat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Tingkat Kasus Korupsi di Indonesia tahun 2011 – 2021.

Sumber : Indonesia Corruption Watch dan MENLHK

Pada Gambar 1.3 diketahui bahwa, IKLH mengalami kenaikan tertinggi di tahun 2018 mencapai angka 71,67 dan kasus korupsi sendiri tertinggi pada tahun 2019 sebesar 40 point. Tingginya tingkat IKLH pasti memiliki faktor penyebab, seperti aparatur sipil negara (ASN) memberikan biaya tambahan disuatu proyek sumber daya alam, memberikan kelonggaran izin dalam pengelolaan sumber daya alam secara ilegal hal tersebut termasuk gratifikasi menurut pendapat MENLHK (2017). Hal ini berdampak kerusakan lingkungan yaitu menurunnya kualitas lingkungan.

Korupsi dapat memperburuk kondisi ini karena meningkatkan peran negatif yang besar dalam semua masalah lingkungan sehingga mempengaruhi sistem alam dan komunitas yang bergantung padanya (Leitao, 2016). Kondisi ini menimbulkan beberapa efek negatif yaitu kerusakan di sumberdaya terbarukan. Berdasarkan laporan Bank Dunia (2015) tentang korupsi dan kehutanan menekankan bahwa banyak sekali contoh kegiatan korupsi bawah tanah pada sektor ini, laporan ini memberikan daftar kegiatan yang dapat dianggap sebagai korupsi yang terjadi pada sektor kehutanan yang berdampak merugikan pada pengelolaan dan konversi hutan.

Contohnya kasus tempat pengolahan kayu (*sanwill*) ilegal dalam kasus ini mengamankan 664 batang kayu gelondong dan 2559 keping kayu olahan MENLHK (2020). Hal ini terjadi karena, pembayaran kepada politisi senior untuk mendapatkan izin oleh pejabat berwenang (*konsesi*) lalu pembayaran pun dilakukan kepada birokrat untuk melaporkan jumlah kayu yang berkurang (*korupsi administratif*). Kurangnya institusi untuk menegakkan aturan dan adanya pejabat yang dipengaruhi oleh suap telah menyebabkan pengurangan kayu secara berlebihan serta penggunaan praktik pengelolaan hutan yang tidak lestari (Lisciandra dan Migliardo, 2016).

Selain itu, perusahaan kayu dapat menyogok pejabat untuk mengabaikan peraturan atau kebijakan lingkungan agar tidak dilaksanakan, sehingga perusahaan kayu dapat membuang limbah beracun serta produk sampingan industri lainnya terlepas tanpa terkendali ke lingkungan. Berdasarkan laporan deforestasi Indonesia oleh Environmental Investigation Agency (2018) secara eksplisit menegaskan sebagian besar hutan di Indonesia hancur karena Negara Indonesia adalah salah satu negara paling korup di dunia. Deforestasi diperkirakan menyebabkan banjir,

tanah longsor dan kebakaran hutan misalnya banjir bandang di Sumatera Utara dikaitkan dengan penebangan liar. Selain itu, pembakaran hutan secara ilegal yang dilakukan oleh PT Waringin Agro Jaya (PT. WAJ) di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan hal ini menyebabkan kabut asap di Negara tetangga yaitu Negara Malaysia dan Singapura yang merugikan negara sebesar Rp. 466.468.991 MENLHK (2020).

Tidak hanya itu penebangan liar dan pembakaran hutan secara ilegal menyebabkan populasi orang utan menjadi berkurang hingga setengahnya dalam dekade terakhir MENLHK (2020). Penebangan liar menyebabkan terjadinya perburuan orang utan, karena mereka tidak memiliki tempat tinggal dan rentan terjadinya pemburuan liar. Orang utan berkontribusi dalam mensuburkan hutan di Indonesia karena orang utan menyemai hutan melalui buah - buahan yang mereka makan. Selanjutnya korupsi memberikan efek negatif di sektor sumber daya tak terbarukan, korupsi pada sektor ini memperburuk degradasi lingkungan dari sistem industri yang sudah rusak (Leitao, 2016). Korupsi memberikan konsesi menghilangkan banyak hukuman karena beroperasi dengan cara yang tidak berkelanjutan. Seperti penambangan ilegal berkontribusi terhadap berbagai masalah lingkungan yang muncul operasi penambangan menghasilkan tailing penambangan, gas pelebur, bahan kimia pengapungan lapisan penutup, dan produk oksidasi termasuk asam, serta mengeluarkan polutan udara hingga lumpur (Tegnan *et al.*, 2021).

Undang – undang lingkungan yang disepelekan disertai dengan pejabat korup mengizinkan perusahaan yang beroperasi di industri ini untuk membuat kebijakannya sendiri dengan imbalan suap untuk mengabaikan kerusakan

lingkungan. Akibatnya sebagian besar polutan berbahaya dibuang secara ilegal dan menyebabkan degradasi lahan yang luas serta erosi tanah dan terjadinya pencemaran udara (Tegnan *et al.*, 2021).

Adapula efek negatif terhadap sektor infrastruktur yang merusak kualitas lingkungan, seperti adanya bendungan besar menimbulkan kerusakan jangka panjang dan sulit untuk diatasi, karena banyak spesies lebih menyukai dasar lembah untuk mencari makan dan bereproduksi sehingga menyebabkan kurangnya sumber makanan bagi masyarakat sekitar. Korupsi dan tata kelola yang buruk dapat meningkatkan masalah sosial dan lingkungan, kurangnya pengawasan terhadap dampak lingkungan untuk mengungkapkan secara terbuka dampak panjang sebuah bendungan menimbulkan kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan lokasi dan konstruksi bendungan sehingga dapat terjadinya kesalahan alokasi dana dan praktik konstruksi serta pemanfaatan fasilitas publik tidak berjalan sebagaimana mestinya (Leitao, 2016).

Selain itu kualitas lingkungan hidup tidak hanya dipengaruhi oleh korupsi saja tetapi dapat juga dipengaruhi oleh kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang berpengaruh terhadap masalah lingkungan, penduduk yang berada pada dibawah garis kemiskinan dianggap sangat bergantung pada lingkungan dan sumber daya alam untuk mempertahankan hidupnya (Reswita *et al.*, 2021).

Penduduk berinteraksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, proses interaksi manusia dan lingkungan ini menyebabkan beberapa kerusakan lingkungan (Sundatoko dan Mariyono, 2010). Akibatnya sumber daya alam digunakan secara terus – menerus tanpa melihat efek yang akan ditimbulkan disisi lain, kualitas lingkungan yang buruk membuat masyarakat sulit untuk

memutus rantai kemiskinan karena kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi yang memadai dan menyebabkan kesehatan yang menurun, kesehatan yang menurun tersebut membuat masyarakat tidak dapat berkerja serta tidak dapat memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka hal ini dapat berpengaruh kondisi Negara karena penurunan pendapatan dan berujung pada kemiskinan (Masrom dan Subramaniam, 2018).

Kondisi hidup orang miskin umumnya tinggal di lingkungan yang tidak sehat kurangnya sanitasi lingkungan dan buruknya sistem drainase (Khan, 2019). Di negara berkembang sebagian besar kegiatan pembangunan tidak berkelanjutan, manusia telah merusak sumber daya lingkungan dengan sengaja ataupun tanpa sadar melalui banyak aktivitasnya yang tidak terkendali seperti pengundulan hutan, praktik pertanian yang tidak berkelanjutan, urbanisasi, pembakaran, industrialisasi, perburuan liar dan penelantaran (Redina, 2021).

Lingkungan yang baik merupakan indikator dari suatu tingkat perekonomian suatu negara karena semakin baiknya kondisi perekonomian maka akan rendahnya tingkat kemiskinan di negara tersebut, jika kondisi lingkungan buruk atau rusak maka akan menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem yang berada disekitarnya. Kemiskinan dan lingkungan hidup saling terkait erat dan masing- masing saling mempengaruhi satu sama lain, kemiskinan merupakan penyebab utama degradasi lingkungan apabila lingkungan rusak maka akan terganggunya sistem keberlangsungan hidup manusia begitupun sebaliknya apabila tingkat kemiskinan tinggi maka akan terjadinya kerusakan lingkungan hidup (Gaeddert dan Oether, 2015).

Hal tersebut diperkuat dengan teori kutukan sumberdaya alam yang dikemukakan oleh Auty (1993) menjelaskan bahwa negara dengan sumberdaya alam yang berlimpah cenderung memiliki perekonomian yang lambat karena negara tersebut tidak dapat mengelola sumberdaya alam tersebut dengan baik maka, dapat menimbulkan sumber bencana bagi negara tersebut. Dalam beberapa fenomena yang ada pada Negara yang sedang berkembang, kekayaan sumberdaya alam tidak memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan dan pertumbuhan ekonominya, namun kelimpahan sumberdaya yang dimilikinya malah menimbulkan keterbelakangan dan kemiskinan, yang lebih melibatkan pihak asing dalam pengolahannya (Putra, Azhar dan Marta, 2015). Fenomena kutukan sumberdaya alam terjadi ketika kelimpahan sumberdaya alam tersebut identik dengan ketergantungan sumberdaya alam (*resource dependence*) dimana menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Negara pengekspor minyak sebesar 1,3% per tahun, lebih rendah dari rata-rata negara-negara berkembang lainnya yang tumbuh sebesar 2,2% pertahun (Auty, 2021).

Fenomena ini semakin jelas terlihat dengan adanya 5 provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan migas tapi memiliki tingkat kemiskinan yang masih jauh dari rata-rata nasional sebesar 10,5% diantaranya Nagroe Aceh Darusalam 18,58%, Sumatera Selatan 13,84%, Jawa Timur 13,08% Maluku 20,76% dan Papua Barat 27,04%. Sedangkan daerah yang tidak memiliki migas yang terjadi malah sebaliknya angka kemiskinan yang lebih baik dari rata-rata nasional (Putra, Azhar dan Marta, 2015). Tidak hanya provinsi di Indonesia tetapi juga negara- negara lainnya mengalami kutukan sumberdaya alam tersebut menurut Auty (1994) contohnya Negara Bolivia. Selama ledakan mineral 1974-1981, Bolivia

menunjukkan akibat wajar dari tesis kutukan sumberdaya alam dimana menimbulkan hiperinflasi, jatuhnya harga mineral. Pada negara pekspor minyak dan mineral menegaskan fakta bahwa sumberdaya mineral dapat dengan mudah berubah menjadi kutukan daripada berkah.

Penelitian ini penting dilakukan karena tingginya tingkat korupsi di Indonesia menyebabkan terganggunya sistem perekonomian maupun sistem keberlangsungan kualitas lingkungan hidup tetapi hal tersebut jarang disoroti oleh pemerintah, karena korupsi sudah menjadi budaya tersendiri dan sulit dihilangkan oleh karena itu pentingnya membahas permasalahan praktik korupsi ini agar dapat mengetahui seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan dan dapat mengetahui apa saja yang menyebabkan terjadinya praktik korupsi tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Kausalitas antara Korupsi terhadap Kemiskinan, Korupsi terhadap Kualitas Lingkungan Hidup serta Kemiskinan terhadap Kualitas Lingkungan Hidup pada 5 Provinsi yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis “Kausalitas Korupsi terhadap Kemiskinan dan Kualitas Lingkungan Hidup serta Kausalitas antara Kemiskinan dan Kualitas Lingkungan Hidup”.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- A. Memberikan tambahan pengetahuan terkait pengembangan ilmu ekonomi yaitu korupsi dan kemiskinan serta hubungan antara korupsi dan kualitas lingkungan dan juga wawasan mengenai keterkaitan kemiskinan pada kualitas lingkungan hidup pada 5 Provinsi dengan tingkat korupsi tertinggi di Indonesia tahun 2011- 2021.
- B. Memberikan informasi ilmiah yang berguna sebagai referensi di kalangan akademis dalam melanjutkan penelitian sejenis.

1.2.2 Manfaat Praktik

- A. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi peneliti agar dapat memahami tentang fenomena keterkaitan antara korupsi pada kemiskinan dan kualitas lingkungan hidup di 5 Provinsi dengan tingkat korupsi tertinggi di Indonesia.
- B. Bagi pengambil kebijakan, diharapkan penelitian ini dapat membantu para pengambil kebijakan dalam peningkatan ekonomi negara yang bebas dari korupsi dan kualitas lingkungan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aina, O. (2014). How Corruption Contributes to Poverty 1. *Journal, 1(international conference)*, 19.
- Agency, E. I. (2018). *Deforestasi sawit di Indonesia*. <https://eia-international.org/wpcontent/uploads/>
- Aldakhil, A. M., Nassani, A. A., Awan, U., Abro, M. M. Q., & Zaman, K. (2018). Determinants of green logistics in BRICS countries: An integrated supply chain model for green business. *Journal of Cleaner Production*, 195, 861–868. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.05.248>
- Ali, M. (2018). Analisis Ekonomi Politik Terhadap Korupsi (Dalam Perspektif Struktural Menuju Pemahaman Teoritik Baru Tentang Korupsi Politik Di Indonesia). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 56-63.
- Bai, W., Yan, L., Liang, J., & Zhang, L. (2022). Mapping Knowledge Domain on Economic Growth and Water Sustainability: A Scientometric Analysis. In *Water Resources Management* (Vol. 36, Issue 11, pp. 4137–4159). Springer Science and Business Media B.V. <https://doi.org/10.1007/s11269-022-03245-7>
- Baktiar, A. F., Fadhilah, H., Simatupang, M. D., Warman, M., Vira, S., dan Nooraeni, R. (2020). Pengaruh Tindak Korupsi Terhadap Kemiskinan Di Negara-Negara Asia Tenggara Dengan Model Panel Data. *Indonesian Journal of Statistics and Its Applications*, 4(2), 311–320. <https://doi.org/10.29244/ijsa.v4i2.634>.
- Bura, R. O., & Puspito, N. T. (2011). Nilai dan Prinsip Anti Korupsi. In *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. <http://akperrsdustira.ac.id/wp-content/uploads/2017/07/Buku-Pendidikan-Anti-Korupsi-untuk-Perguruan-Tinggi-2017-bagian-1.pdf>
- Butar, F. B., Feliciano, I., & Mulahela, T. (2020). Mungkinkah Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Korupsi? *Prosiding Temu Profesi Tahunan PERHAPI*, 1(1), 889–902. <https://doi.org/10.36986/ptptp.v1i1.129>
- Capri, W., Dhian Cahyati, D., Hasanah, M., Prasongko, D., & Prasetyo, W. (2021). Kajian Korupsi sebagai Proses Sosial: Melacak Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam di Indonesia. *Integritas*, 7(1), 121–142. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.730>

- Capps, K. A., Bentsen, C. N., & Ramírez, A. (2016). Poverty, urbanization, and environmental degradation: Urban streams in the developing world. *Freshwater Science*, 35(1), 429–435. <https://doi.org/10.1086/684945>
- Carcillo, J. M. (2012). *Developing economies : innovation, investment and sustainability*. Nova Science Publishers.
- Chen, H., Hao, Y., Li, J., & Song, X. (2018). The impact of environmental regulation, shadow economy, and corruption on environmental quality: Theory and empirical evidence from China. In *Journal of Cleaner Production* (Vol. 195). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.05.206>
- Chetwynd, E. D. (2003). Corruption and Poverty: A Review of Recent Literature. In M. S. International. Washington, DC 20024 USA.
- Connery, A. W. (2020, Rajawali Press Jakarta). *Kajian yuridis terhadap tindak pidana korupsi pada situasi pandemi covid-191*.
- Cui, M., Wang, J. S., & Chang, C. P. (2021). Environmental quality, corruption and industry growth: The global perspective. *Problemy Ekorożwoju*, 16(1), 29–37. <https://doi.org/10.35784/pe.2021.1.03>
- Eka, H., Maruto, P., & Basuki, U. (2019). ANALISIS PENGARUH INVESTASI DAN BUDGET DEFICIT TERHADAP PERTUMBUHAN DI INDONESIA. *DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS*, 1, 67. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje>
- Engkus, Ridha, F. N., Komarasari, F., & Damayanti, I. (2022). Dampak Masif Korupsi Terkait Dengan Penyalahgunaan Anggaran Di Masa Pandemi Covid-19. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(1), 38–50. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/6639>
- Falah, A. A. (2016). Kausalitas Korupsi, Kemiskinan, dan Pertumbuhan Ekonomi pada 8 Kota di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 2.
- Fouquet, R. (2016). Sustainability of “Sustainable” Energy Use: Historical Evidence of the Link between Economic Growth and Renewable Energy. *Baque Centre for Climate Change Klima Aldaketa Ikergai*, 1–20. <https://core.ac.uk/download/pdf/6227967.pdf>
- Ganda, F. (2020). The influence of corruption on environmental sustainability in the developing economies of Southern Africa. *Heliyon*, 6(7). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04387>

- Ghani, M. U., Qasim, M., Bashir, A., & Anees, M. M. (2014). Review : Poverty Influence on Environment Institute of Environmental Sciences Engineering (IESS),. *Middle-East Journal of Scientific Research*, 21(6), 870–874. <https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2014.21.06.83234>
- Gujarati D, 2013, Dasar-Dasar Ekonometrika edisi 5, Selemba Empat, Jakarta
- Haifa, R., dan Siregar, M. I. (2019). Korupsi dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 4(4), 464–473.
- Hayat, M. (2016). Pencegahan terhadap tindak pidana korupsi pemerintahan desa: kajian politik kebijakan dan hukum pengelolaan sumber daya alam desa. *Yustisia Edisi 95 Mei - Agustus 2016*, 2(1), 73-80.
- Hartisa,N., dan Putri,D.,N.(2021). Analisis Kausalitas Ketimpangan Pendapatan, Korupsi dan Kemiskinan di Negara Lower Middel Income Asean.*Jurnal kajian ekonomi dan pembangunan*,3(6),43-48.
- Hassan, S. A., Zaman, K., & Gul, S. (2015). The Relationship between Growth-Inequality-Poverty Triangle and Environmental Degradation: Unveiling the Reality. *Arab Economic and Business Journal*, 10(1), 57–71. <https://doi.org/10.1016/j.aebj.2014.05.007>
- Heriyanto, M. (2021). Aspek Tindak Pidana Korupsi Pada Perizinan Pembalakan Liar. *Journal incio legis*, 2(1), 1-16.
- Heger, M., Zens, G., & Bangalore, M. (2018). Does the Environment Matter for Poverty Reduction? The Role of Soil Fertility and Vegetation Vigor in Poverty Reduction. *Does the Environment Matter for Poverty Reduction? The Role of Soil Fertility and Vegetation Vigor in Poverty Reduction, August*. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-8537>
- Ibimilua, F. (2011). Linkages between Poverty and Environmental Degradation. *African Research Review*, 5(1), 475–484. <https://doi.org/10.4314/afrev.v5i1.64545>
- Ilmiah, J. (2014). *KAUSALITAS PENGELUARAN PEMERINTAH, INFLASI, DAN PENDAPATAN NASIONAL DI INDONESIA*.
- ICW.(2016). Korupsi Sektor Swasta. <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-sektor-swasta>. [Diakses pada tanggal 06 Oktober2022].
- Irawan, P. (2004). Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinandi Indonesia. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 2005, 1–19.

- Jannah, F. Z., & Susilowati, D. (2020). Corruption and Poverty Alleviation In Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 4(2), 339–353. <https://doi.org/https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/view/8254/8799>
- Joko, W. (2010). Analisis Hubungan Kausalitas Antara Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan: Suatu Studi Lintas Negara. *Buletin Ekonomi*, 8(2), 159–170.
- Junaidi, P. (2017). Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi I Ketut Patra, J. (2018). Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia (S2). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 71–79. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i1.5609> Dan Kemiskinan Di Indonesia (S2). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 71–79.
- Kartodihardjo, H., Ariati, N., & Abdullah, M. (2020). Kebijakan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam Melalui Pendekatan Institusional dan Struktural. *Jurnal INTEGRITAS (Edisi Khusus): Evaluasi Pemberantasan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam*, 5(2), 3. <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2-2>. 481
- Kadji, Y. (2020). Kemiskinan dan konsep teoritisnya.
- Kartiasih, F., & Pribadi, W. (2020). Environmental Quality and Poverty Assessment in Indonesia. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 10(1), 89–97. <https://doi.org/10.29244/jpsl.10.1.89-97> Keuangan, K. R. (2022). *Dana Bantuan Operasional Sekolah*. Kementerian Keuangan RI. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/pontianak/id/data-publikasi/berita-terbaru/2927-dana-bantuan-operasional-sekolah-bos.html>
- Khan, S. A. R. (2019). The nexus between carbon emissions, poverty, economic growth, and logistics operations-empirical evidence from southeast asian countries. *Environmental Science and Pollution Research*, 26(13), 13210–13220. <https://doi.org/10.1007/s11356-019-04829-4>
- Khairudin, Marliani, S., Aminah, Amna, L. S., & Soerdarsa, H. G. (2021). Apakah Korupsi Berdampak Buruk Pada Kemiskinan. *Akuntansi & Keuangan*, 12(1), 55–61.
- KPK,(2016).<https://www.kpk.go.id/id/publikasi/kajian-dan-penelitian/papers-antikorupsi/500-agar-sumberdaya-lebih-berdaya>. [Diakses pada tanggal 06 Oktober 2022].

- Leitao, A. (2016). Corruption and the Environment. *Journal of Socialomics*, 05(03).
<https://doi.org/10.4172/2167-0358.1000173>
- Lisciandra, M., & Migliardo, C. (2017). An Empirical Study of the Impact of Corruption on Environmental Performance: Evidence from Panel Data. *Environmental and Resource Economics*, 68(2), 297–318.
<https://doi.org/10.1007/s10640-016-0019-1>
- Masron, T. A., & Subramaniam, Y. (2019). Does Poverty Cause Environmental Degradation? Evidence from Developing Countries. *Journal of Poverty*, 23(1), 44–64. <https://doi.org/10.1080/10875549.2018.1500969>
- MENKLHK.(2021). KLHK Gugat Dua Perusahaan Pembakar Hutan Dan Lahan Di Kalimantan.<http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6378/klhk-gugat-dua-perusahaan-pembakar-hutan-dan-lahan-di-kalimantan>. [Diakses pada tanggal 06 Juni 2022].
- Nwankwo, R. N. (2013). Official corruption and poverty reduction in Nigeria: a critical assesment (2003-2010). *International Journal of Arts dan Sciences*, 6(2), 305–329.
- Pellegrini, L., & Gerlagh, R. (2006). Corruption and environmental policies: What are the implications for the enlarged EU? *European Environment*, 16(3), 139–154. <https://doi.org/10.1002/eet.414>
- Pfaff, A., Barelli, P., & Chaudhuri, S. (2004). Aid, economic growth and environmental sustainability: rich-poor interactions and environmental sustainability in developing countries. *International Journal of Global Enviromental Issues*, 4, 139–159.
<https://dx.doi.org/10.1504/IJGENVI.2004.005288>
- Prasetyo,E.(2021). Terdakwa Korupsi Dana BOS di Palembang Terancam Penjara 20 Tahun. <https://www.merdeka.com/peristiwa/terdakwa-korupsi-dana-bos-di-palembang-terancam-penjara-20-tahun.html>. [Diakses pada tanggal 06 Juni 2022].
- Rahayu, I. P., dan Widodo, T. (2012). The Causal Relationship Between Corruption and Poverty in Asean : a General Method of Moments / Dynamic Panel Data Analysis Hubungan Kausalitas Antara Korupsi Dan Kemiskinan Di Asean : Generalized Method of Moments / Dynamic Panel Data. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 15(3), 527–536.
- Reswita, Gita,M., dan Reflis. (2021). Hubungan degrasi lingkungan dengan kemiskinan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(5), 1571-1583.

- Reda Rizal. (2017). *Analisis Kualitas Lingkungan, Pencemaran Udara, Pencemaran Air, Pencemaran Tanah, Aktivitas Sosial-Ekonomi-Budaya Trilobal Pencemaran Lingkungan* (Issue July).
- Ridena, S. (2020). Kemiskinan Dan Lingkungan: Perspektif Kemiskinan Di Perkotaan Dan Pedesaan. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 5(1), 39–48. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v5i1.196>
- Rizk, R., & Slimane, M. Ben. (2018). Modelling the relationship between poverty, environment, and institutions: a panel data study. *Environmental Science and Pollution Research*, 25(31), 31459–31473. <https://doi.org/10.1007/s11356-018-3051-6>
- Román, C. S., Morillas, S., Gitte, G., & Kosvik, H. (n.d.). *Study of the social, environmental and economic policies of each business in their outcome and benefits Data Science*.
- Samputra, P. L., dan Munandar, A. I. (2019). Korupsi, Indikator Makro Ekonomi, dan IPM terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 12(1), 35–46. <https://doi.org/10.24843/jekt.2019.v12.i01.p04>
- Sinha, A., Gupta, M., Shahbaz, M., & Sengupta, T. (2019). Impact of corruption in public sector on environmental quality: Implications for sustainability in BRICS and next 11 countries. *Journal of Cleaner Production*, 232, 1379–1393. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.06.066>
- Shabbir, M. S., Abbas, M., Aman, Q., Ali, R., & K, O. (2019). *Strategi Penanggulangan Kemiskinan. Menjelajahi hubungan antara Kemiskinan dan Korupsi dari yang kurang, Kaitan antara kemiskinan dan korupsi juga dianalisis dan dibahas secara khusus negara maju. 2, 1–21.* <http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/>
- Shanty, O., Dita, W. P., Firmansyah, & Sugiyanto, F. X. (2018). The Relationship between Environmental Degradation, Poverty and Human Quality in Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 73, 4–6. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187310020>
- Sudantoko, D., dan Mariyono, J. (2010). Tinjauan Teoritis Pembangunan Pedesaan Yang Berkelanjutan: Pengentasan Kemiski Jejek, 3(2), 132–142. <https://doi.org/10.15294/jejak.v3i2.4656>.
- Sutri, S. (2018). Politik kebijakan di sektor pertambangan: Dinamika Implementasi Kebijakan cnc di Kabupaten Pasaman Barat. *J I S I P - U N J A*, 1(2), 99–127.
- Setiawan, K. (2021). Mensos Apresiasi Langkah Polres Malang Ungkap Korupsi Dana Bantuan PKH. <https://kemensos.go.id/mensos-apresiasi-langkah->

polres-malang-ungkap-korupsi-dana-bantuan-pkh.[Diakses pada tanggal 06 Juni 2022].

Tacconi, L., & Williams, D. A. (2020). *Annual Review of Environment and Resources Corruption and Anti-Corruption in Environmental and Resource Management*. <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-012320>

Tegnan, H., Karjoko, L., Barkhuizen, J., & Bajrektarevic, A. H. (2021). Mining Corruption and Environmental Degradation in Indonesia: Critical Legal Issues. *Bestuur*, 9(2), 90–100. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v9i2.55219>

Transparency International, 2021. Indonesia scored 38 points out of 100 on the 2021 Corruption Perceptions Index reported by Transparency International. <https://tradingeconomics.com/indonesia/corruption-index>. [Diakses pada tanggal 06 Juni 2022].

Todar, M., P. (2006). *Pembangunan Ekonomi Jilid Satu Edisi Sembilan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Voth-Gaeddert, L. E., & Oerther, D. B. (2015). Measuring Multidimensional Poverty in a Complex Environment; Identifying the Sensitive Links. *Procedia Engineering*, 107, 172–180. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.06.071>

Wamad, S. (2017). Korupsi BLT-Dana Desa, Kades Tenjomaya Cirebon Jadi Tersangka "Korupsi BLT-Dana Desa, Kades Tenjomaya Cirebon Jadi Tersangka" selengkapnya <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5872681/korupsi-blt-dana-desa-kades-tenjomaya-cirebon-jadi-tersangka>. [Diakses pada tanggal 06 Juni 2022].

Williams, A., & Dupuy, K. (2017). Deciding over nature: Corruption and environmental impact assessments. *Environmental Impact Assessment Review*, 65, 118–124. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2017.05.002>

Yuwanto, L. (2016). Kinerja Penanganan Tindak Pidana Korupsi Sumber Daya Alam dan Kepercayaan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. *Integritas*, 2(1), 25–41.

Yolanda, & Satrianto, A. (2019). Pengaruh Korupsi, Demokrasi dan Politik terhadap Kemiskinan di Delapan Negara ASEAN Dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 845–854. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24036/jkep.v1i3.7711>

Zakariya, R. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: